

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TABUNGAN HARI RAYA**

(Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**KAUTSAR SEPTIA WULANDARI
NPM. 1521030474**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TABUNGAN HARI RAYA**

(Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.
Pembimbing II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1442 H/2021 M

ABSTRAK

Penitipan adalah dengan menitipkan suatu benda yang diletakkan kepada orang lain untuk dijaganya secara layak . *Wadī'ah* adalah suatu amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Dan di dalam rukun *Wadī'ah* terdapat akad, akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak, keduanya melaksanakan apayang telah disepakati. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak, maka kebutuhan masing-masing pihak bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan, salah satunya dengan menabung. Tabungan merupakan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu.

Berdasarkan latar belakang terdapat rumusan masalah yaitu, bagaimana praktik tabungan hari raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung, dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik tabungan hari raya, dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tabungan hari raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait yaitu penyimpan uang tabungan hari raya (pemegang tabungan) dan pemilik uang tabungan hari raya (penabung). Sedangkan pengolahan datanya dengan teknik *editing* terhadap data yang diperoleh, *organizing* yaitu menyusun data yang telah diperoleh, *analizing* yaitu analisis data sehingga dapat difahami dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 1. Terdapat 4 faktor yang membuat terjadinya pelaksanaan praktik tabungan hari raya, yaitu: Jarak, dikarenakan jarak untuk menabung ke bank lebih jauh maka para penabung lebih memilih menabung dengan Ibu Rahmasari dikarenakan jarak yang lebih dekat untuk menabungkan uang. Biaya, selain jarak yang jauh untuk menabung ke bank, juga menggunakan transportasi yang membutuhkan bahan bakar (bensin) semakin jauh lokasi bank maka semakin banyak pula bensin yang dibutuhkan sehingga pengeluaran biaya untuk bensin pun juga bertambah. Waktu,

untuk menabung ke bank juga membutuhkan waktu yang luang dan juga harus datang ke lokasi banknya langsung. Lebih mudah, menabung dengan Ibu Rahmasari juga lebih mudah dan efisien karena ada kemudahan dalam bertransaksi yaitu tidak perlu harus mengantri, biasanya jika menabung di bank penabung harus mengantri antrian di bank, tidak terkena biaya administrasi, bisa diambil kapan saja jika penabung sedang membutuhkan pengeluaran yang tidak terduga.

2. Pelaksanaan praktik tabungan hari raya yang terjadi di Perum Nusantara Permai, pada praktik ini pemegang tabungan hari raya bersedia dan sanggup menyimpan uang orang-orang yang mengikuti tabungan hari raya tanpa memberitahu para penabung bahwa uang tabungan para penabung yang disimpan dipakai untuk modal usaha yang sedang ia jalani. Pemegang tabungan pun tidak memberikan bonus/bagi hasil keuntungan yang didapat dari hasil usaha kepada para penabung.

3. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik tabungan hari raya yang terjadi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung jika ditinjau dari rukun dan syarat *wadī'ah* semuanya terpenuhi. Kemudian jika dilihat dari hukum *wadī'ah*, hukum *wadī'ah* terdapat empat macam, yaitu sunnah, haram, wajib dan makruh, dan di sini hukumnya ialah sunnah dikarenakan pemegang tabungan percaya bahwa dirinya sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya, dan pantas pula untuk menerima titipan asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Seperti pemegang tabungan yang dipercaya para penabung untuk menyimpan uang mereka dan para penabung yang merasa tidak keberatan jika uang yang ditabung dipakai untuk usaha pemegang tabungan asalkan ketika para penabung membutuhkan uang itu dan ingin mengambilnya, pemegang tabungan selalu siap mengembalikan uangnya tanpa berkurang uang tabungannya sedikitpun agar tidak ada yang dirugikan salah satu pihak maka praktik tersebut dapat dikatakan sah. Sebab tidak merugikan salah satu pihak dan tanggapan dari para penabung pun positif, para penabung merasa terbantu dengan adanya tabungan hari raya tersebut dikarenakan dapat memenuhi kebutuhan para penabung.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kautsar Septia Wulandari
NPM : 1521030474
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)”** adalah benar- benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2021
Penulis,



Kautsar Septia Wulandari
NPM. 1521030474



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Kautsar Septia Wulandari

NPM : 1521030474

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.

Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

NIP. 195707051989031001

NIP. 198206262009011015

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)** disusun oleh, Kautsar Septia Wulandari, NPM : 1521030474, Program Studi Muamalah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Mei 2021, Pukul 09:00 s/d 11:00 WIB di Ruang Sidang II Fakultas Syari'ah.

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I.

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag.

Penguji III : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. H. Khoiruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

(QS. Al-Maidah: 1)



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat di *Yaumul Qiyamah*, *aamiin*. Dengan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini dan ucapan terimakasih kepada:

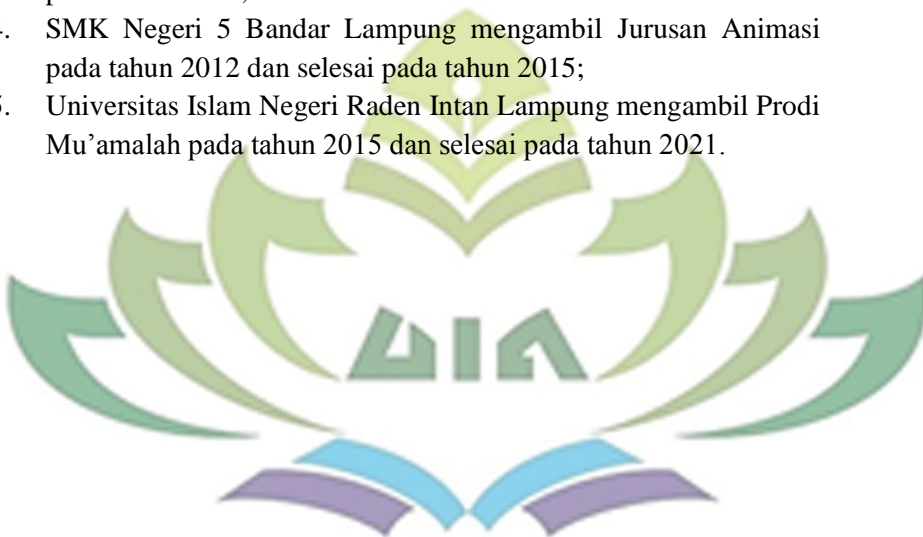
- 1 Bapak dan Ibuku tercinta (Bambang Wiratmo AH dan Rahmasari Sanggam) yang telah mengasuh, mendidik, membiayai, membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang, selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan dan kebahagiaanku di SyurgaNya. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orangtuaku untuk menjadikan aku orang yang kuat, mandiri, dewasa dalam berfikir dan bertindak.
- 2 Adik perempuanku satu-satunya Yunita Dewi Arum yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, mendo'akanku dan selalu mendengarkan keluh kesahku. Semoga kelak dapat membanggakan serta menjadi seseorang yang bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan kebahagiaan kepada dirimu baik di dunia maupun di akhirat.

RIWAYAT HIDUP

Kautsar Septia Wulandari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7 September 1998, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bambang Wiratmo AH dan Rahmasari Sanggam.

Riwayat Pendidikan:

1. TK Kesuma Alam pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003;
2. SD Negeri 2 Sukabumi Bandar Lampung pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009;
3. MTs Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012;
4. SMK Negeri 5 Bandar Lampung mengambil Jurusan Animasi pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015;
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Prodi Mu'amalah pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2021.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjungagungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun Judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum. Nusantara Permai Bandar Lampung)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritik dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris Muamalah yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi mahasiswa-mahasiswanya.
4. Bapak Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Bapak/Ibu Staf Karyawan Akademik Fakultas Syari'ah, Pengelola Perpustakaan Syari'ah dan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan dan telah mendidik untuk mampu berpikir lebih maju.
7. Diriku sendiri, terimakasih telah bertahan dan kuat hingga saat ini.
8. Ibu Rahmasari selaku pemegang tabungan hari raya dan Ibu-Ibu Perum. Nusantara Permai yang terlibat langsung dan ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih atas waktu dan bantuannya.
9. Sahabat-sahabatku Dwi Rahmawati Putri dan Bella Dwi Putri terimakasih atas dukungannya dan bantuannya selama ini.
10. Idolaku SHINee yang telah menemani hari-hariku selama 11 tahun ini, selalu menghibur dan memberikanku semangat disaat sedang senang maupun sedih.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Puspita Sari, Juliyana, Mba Yeyen, Mba Cici dan Nurul Amalia yang telah membantu dan memotivasi selama ini.

Bandar Lampung, April 2021

Penulis,

Kautsar Septia Wulandari

NPM. 1521030474

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	1
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah.....	3
E. Tujuan Penelitian	4
F. Signifikasi Penelitian	4
G. Metode Penelitian	4

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tabungan.....	9
B. Aspek-Aspek Akad	10
1. Pengertian Akad	10
2. Dasar Hukum Akad.....	11
3. Rukun-Rukun Akad	11
4. Syarat-Syarat Akad	15
5. Macam-Macam Akad.....	16
6. Ilzam dan Iltizām	21
7. Berakhir Suatu Akad.....	22
C. Wadī'ah (Barang Titipan) Dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Wadī'ah.....	22
2. Dasar Hukum Wadī'ah	28
3. Rukun dan Syarat Wadī'ah	28
4. Macam-Macam Wadī'ah.....	30
5. Hukum Menerima Benda Titipan.....	33
6. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan	34
7. Berakhirnya Akad Wadī'ah.....	35

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.....	37
1. Kondisi Geografis	37
2. Kondisi Demografis	37
3. Struktur Kelurahan Nusantara Permai Kota Bandar Lampung	40
B. Praktik Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.....	40
1. Sejarah Singkat Awal Mula Adanya Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.....	40
2. Struktur Tabungan Hari Raya	43
3. Lokasi Tabungan Hari Raya	46
4. Batas-Batas Lahan Rumah Tempat Menabung	47
5. Praktik Tabungan Hari Raya.....	47
6. Faktor Terjadinya Praktik Tabungan Hari Raya	49
7. Tanggapan Ibu-Ibu Tentang Tabungan Hari Raya.....	50

BAB IV ANALISA DATA

A. Praktik Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.....	53
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara permai.....	53
2. Kelebihan Dan Kekurangan Praktik Tabungan Hari Raya Menurut Penabung.....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam penulisan ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)”**. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul di atas maka penulis uraikan secara singkat mengenai judul di atas:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata Tinjau yang berarti, melihat, menyelidiki, memeriksa dan menduga untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹

Menurut Ahli Ushul, Hukum Islam adalah *Khihtab* (titah) Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang Mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah dan larangan) memilih (antara melakukan atau meninggalkan sesuatu), atau berupa sebab akibat.²

Tabungan Hari Raya berasal dari kata tabungan yang berarti tempat menabungkan/menyimpan uang.³ Sedangkan Hari Raya atau lebih tepatnya Idul Fitri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti setelah selesai menjalankan ibadah puasa yang jatuh pada tanggal 1 Syawal.⁴

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Alasan Objektif

Di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung yang menjadi objek penelitian, Tabungan Hari Raya masih adanya

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1529.

²Ahmad Sukardja, dan Mujar Syarif, *Tiga Kategori Hukum, Syariat dan Kanun* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h.35.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h.1407.

⁴*Ibid.*, h.538.

kesamaran dalam objek atau uang tabungan yang ditabungkan tersebut tidak ada bagi hasilnya.

2. Alasan Subjektif

Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Untuk kelangsungan hidupnya dimana sudah Sunnatullah bahwa manusia selain makhluk individu juga makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan makhluk individu lainnya seperti, saling bekerja sama/gotong royong dan memberikan bantuan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah swt didalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
(Q.S. Al-Hujurat (49) : 13)

Terdapat banyak ragam hubungan manusia satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah tabung-menabung. Tabungan ini berbeda dari yang lainnya, karena tabungan tersebut diambil pada hari raya Idul Fitri untuk keperluan-keperluan yang dibutuhkan pada saat hari raya Idul Fitri.

Sistem praktik uang yang diputar pada Tabungan Hari Raya ini, mereka melakukan tabung-menabung yang sudah berjalan selama 15 tahun ini di Perum Nusantara Permai. Para ibu-ibu di perumahan tersebut kebanyakan sudah mengetahui bahwa adanya

tempat menabung yang dilaksanakan oleh pemegang tabungan tersebut. Dengan memanfaatkan uang tabungan tersebut pemegang tabungan memakai atau memutar uang tabungan itu untuk usaha yang ia jalani mulai dari Laundry, Air Isi Ulang dan Kredit Barang. Dari hasil keuntungan usahanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dipakai lagi untuk tambahan modal usahanya.

Pada saat Idul Fitri pemegang tabungan sudah harus siap untuk mengembalikan uang-uang tersebut. Tetapi terkadang ada juga ibu-ibu yang mengambil tabungannya sebelum pada hari raya dikarenakan ibu-ibu tersebut ada kebutuhan yang mendesak. Pemegang tabungan mau tidak mau harus sudah siap menyiapkan uang tersebut untuk dikembalikan. Pada saat menjelang hari raya saat uang tabungan itu dibagikan terkadang atau rata-rata ketika uang tabungan para ibu-ibu itu dikembalikan mereka secara sukarela memberi persenan kepada pemegang tabungan karena bentuk rasa terima kasih karena sudah mau menyimpankan atau menitipkan uang tersebut.

Tetapi bagaimana jika uang tabungan tersebut tidak dibagi hasil apakah diperbolehkan? Padahal pemegang tabungan justru mendapat keuntungan dari hasil usahanya yang modalnya ia dapatkan dari uang tabungandan terlebih lagi ia mendapat persenan dari para ibu-ibu Perum Nusantara Permai.

Berdasarkan fenomena ini, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tabungan hari raya.

Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Hari Raya (Studi di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung)”**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik tabungan hari raya.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tabungan hari raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.

F. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem tabungan yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik tabungan yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., dan juga agar dapat dijadikan acuan pelaksanaan tabung-menabung yang sesuai dengan syariat Islam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁵ Melalui penelitian ini dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Dinamakan penelitian lapangan karena tempat penelitiannya di lapangan kehidupan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁷ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai sistem praktek tabungan

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cv., 2016), h.2.

⁶*Ibid.*, h.3.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 2014), h.10.

hari raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung, dengan dijelaskan pula pandangan hukum Islam tentang kejadian konteks tersebut.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁸ Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pemegangtabungan hari raya yang uangnya diputar kembali untuk usahanya. Berupa dokumentasi berupa: catatan buku tabungan, foto-foto dan data penabung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁹ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁰ Dalam hal ini yang menjadi populasi penelitian ini adalah yang terdiri dari 1 sebagai pemegang tabungan hari raya, dan 54 sebagai penabungtabungan hari raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung. Sedangkan untuk sampel yang peneliti ambil adalah 1 orang pemegang tabungan dan 10 orang penabung.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang gejala-gejala sosial dan gejala-gejala psikis

⁸*Ibid.*,h.12.

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*, h.172.

dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹¹ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan penyimpanan tabungan hari raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.

b. *Wawancara/Interview*

Wawancara/Interview adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹² Dalam wawancara penelitian ini wawancara dilangsungkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam tabungan hari raya ini yaitu pemegang uang tabungan hari raya dan penabungtabungan hari raya.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar dari seseorang.¹³ Dokumentasi diperoleh dari pemegang tabungan atau pemegang tabungan di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Pemeriksaan data (editing).*

Apabila pengumpulan data sudah dilakukan, maka data yang sudah terkumpul harus diolah dan dianalisis. Dalam pengolahan data, yang pertama kali harus dilakukan adalah “editing”. Ini berarti bahwa semua kuesioner harus diteliti satu per satu tentang kelengkapan pengisian dan kejelasan penulisannya.¹⁴

b. *Organizing.*

Menyusun dan mensistematika data tentang praktik tabungan hari raya Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.

¹¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2013), h.23.

¹²*Ibid.*, h.95.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D...*, h.240.

¹⁴Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015), h.89.

c. *Analizing.*

Tahapan analisa dan perumusan aturan tabung-menabung dalam Islam dan praktiknya terhadap tabungan hari raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan disesuaikan dengan tujuan penelitian.¹⁵ Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis, yaitu bertujuan mendeksripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung. Kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang sesuai dengan praktik Tabungan Hari Raya di Perum Nusantara Permai Bandar Lampung.



¹⁵*Ibid.*, h.93.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.¹ Adapun yang dimaksud dengan tabungan syar'iah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.² Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadī'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudhārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya.³

Tabungan yang dilakukan pada umumnya dilaksanakan di bank dengan adanya bunga dan administrasi. Jika dikaji dalam pandangan ekonomi, makna bunga (*interest/faidah*) sendiri adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.⁴

Dalam Islam menabung sangatlah dianjurkan, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan yang akan datang sekaligus untuk

¹Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 98.

²Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 297.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (21).

⁴Abdul Qodir Zaelani, "Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)", *Jurnal ASAS*, Vol.IV No.2, h. 1, Juli 2012 (On-line) Tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1678/1399>. (Diakses pada tanggal 26Desember 2020, Pukul 15.57 WIB).

menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok agar lebih baik. Dalam firman Allah SWT. surat An-Nisa' ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٨

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa' (4) : 8)

B. Aspek-Aspek Akad

1. Pengertian Akad

Perjanjian dalam Islam sering disebutkan dengan istilah *aqad* dan kata ini telah diIndonesiakan menjadi kata akad. Padanan kata akad atau sinonimnya dalam bahasa Arab ditemukan beberapa kata seperti *ahd* dan *iltizām*.⁵

Akad (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan). Pertalian *Ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Qabūl* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁶

Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.⁷

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijāb* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabūl*

⁵Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Cet. Ke-3 (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), h. 4.

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 101.

⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 35.

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁸

2. Dasar Hukum Akad

Adapun dasar hukum dilakukannya akad berdasarkan Al-Qur'an adalah surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu.” (QS. Al-Maidah (5) : 1)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa memenuhi akad yang pernah dilakukan atau disepakati adalah wajib hukumnya.

3. Rukun-Rukun Akad

Akad itu mengikat pihak-pihak dengan beberapa hukum *syara'*, yaitu *hak* dan *iltizām*, yang diwujudkan oleh akad. Dan akad itu terbentuk dengan adanya dua *'āqid*, yang dinamakan *tharafayil aqdi* (dua pihak akad) adanya *mahalul aqdi*, yang dinamakan *ma'qūd 'alaihi*; adanya *maudlū'il aqadi* (*ghayataul 'aqad*) dan adanya rukun-rukun akad.⁹ Rukun-rukun dalam akad yaitu:

'Āqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.¹⁰ Seperti apabila beberapa orang waris bersepakat memberikan sejumlah tertentu kepada salah seorang dari mereka yang menerima atau memperoleh bagian dari yang menerima pembayaran itu.¹¹ Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*āqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.

Ma'qūd 'alaih ialah benda-benda yang diakadkan atau yang menjadi obyek akad, seperti benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam

⁸*Ibid.*

⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2016), h. 25.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 47.

¹¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, h. 25.

akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah dan *istimta'* dalam akad zawaj. Ini semua masuk ke dalam akad.

Maudhū' al-āqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. *Maudlu'* ini tetap satu, tidak berbeda-beda dalam akad yang serupa. Kalau berbeda akad, berbedalah *maudlu'*.

Shīghat al 'aqd ialah *ijāb* dan *qabūl*, *ijāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijāb*. Pengertian *ijāb qabūl* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.¹²

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *ijāb* dan *qabūl* (*shīghat al-'Aqd*) ialah:

- a. *Shīghat al-'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijāb qabūl* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “*Aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkapnya ialah “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.
- b. Harus bersesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh, misalnya seseorang berkata, “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan *qabūl* berkata, “*Aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijāb* dan *qabūl* akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 47.

diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling rida.¹³

Mengucapkan akad dengan lidah merupakan salah satu cara yang dalam mengadakan akad, tetapi para ulama menerangkan ada juga cara lain yang ditempuh dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan cara tulisan (*kitābah*), misalnya dua *‘āqid* berjauhan tempatnya, maka *ijābqabūl* boleh dengan cara *kitābah*. Atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah:

الْكِتَابَةُ كَالْخَطَابِ

“Tulisan itu sama dengan ucapan.”¹⁴

Dengan ketentuan *kitābah* tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas. Maksudnya dari kaidah ini ialah pada suatu keterangan ataupun yang lainnya yang diterangkan dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan lisan.¹⁵

- b. Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad atau *ijāb* dan *qabūl* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijāb qabūl* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ijāb* dan *qabūl* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan *ijāb qabūl* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, *qabūl* atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut.

الْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِلْأَخْرَسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 48.

¹⁵ Ahmad Darojat, “الكتاب كالخطاب” (On-line), tersedia di: https://www.academia.edu/35095413/الكتاب_كالخطاب.

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.”¹⁶

Memang, orang bisu bisa menulis agar dapat mewakili ucapan lisannya. Akan tetapi, bagaimana jika dengan yang tidak mampu baca-tulis? Satu-satunya cara untuk memperlakukannya dengan adil yaitu dengan mengakomodir isyarat yang dilakukan dengan anggota tubuhnya. Ini karena baik tulisan maupun isyarat keduanya pada umumnya digunakan untuk menunjukkan suatu keinginan atau tujuan. Dimana tujuan keduanya adalah untuk memahamkan lawan bicara terhadap keinginan mereka. Dan ketika kedua cara tersebut bisa memahamkan, maka secara otomatis ia dapat diterima sebagai salah satu metode bermuamalah, berinteraksi, dan bertransaksi.¹⁷

- c. *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut “seorang nelayan sering memberikan ikan hasil tangkapannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada nelayan yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”.

Proses di atas dinamakan *ta'athi*, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

- d. *Lisān al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 48.

¹⁷Ali Shodiqin, “Isyarat Orang Bisu Sama dengan Ucapannya” (On-line), tersedia di: <https://www.hujjah.net/isyarat-orang-bisu-sama-dengan-ucapannya/>.

dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalālat al-hal*.¹⁸

4. Syarat-Syarat Akad

Setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada empat macam.

- a. Syarat berlakunya akad (*In'iqād*). Syarat *In'iqād* ada yang umum dan khusus.
 - 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.¹⁹ Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan Shighah akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat.²⁰
 - 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam bagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhāfī* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²¹
- b. Syarat sahnya akad (*Shihah*). Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara Syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.
- c. Syarat terealisasiakannya akad (*Nafadz*). Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya).²²
- d. Syarat *Lāzim*.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak,

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 49.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah ...*, h. 35.

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 49.

²²Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah ...*, h. 35.

- seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
 - c. Akad itu diizinkan objek *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *'āqid* yang memiliki barang.
 - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'* seperti jual beli *mulāsamah*.
 - e. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amānah*.
 - f. *Ijāb* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *Qabūl*. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *Qabūl*, maka batallah *ijābnya*.
 - g. *Ijāb* dan *qabūl* mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya *qabūl*, maka *ijāb* tersebut menjadi batal.²³

5. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akad *Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Akad *Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.²⁴

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 50.

²⁴*Ibid.*

Perwujudan akad tampak nyata pada dua keadaan berikut:

- a. Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk seperti di bawah ini.
 - 1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad, bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.
 - 2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad, misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar di hadapan *naib*, wali pengantin laki-laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.
 - 3) *Mu'wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*), ialah seseorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara batinlah untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).²⁵
- b. *Hazl*, ialah ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendaki

²⁵*Ibid.*, h. 51.

adanya akibat hukum dari akad tersebut. *Hazl* berwujud beberapa bentuk, antara lain *muwadha'ah* yang terlebih dahulu dijanjikan, seperti kesepakatan dua orang yang melakukan akad bahwa akad itu hanya main-main, atau disebutkan dalam akad, seperti seseorang berkata; “Buku ini pura-pura saya jual kepada Anda” atau dengan cara-cara lain yang menunjukkan adanya karinah *hazl*.

Kecederaan-kecederaan kehendak disebabkan hal-hal berikut:

- 1) *Ikrah*, cacat yang terjadi pada keridhaan.
- 2) *Khilabah* ialah bujukan yang membuat seseorang menjual suatu benda, terjadi pada akad.
- 3) *Ghalath* ialah persangkaan yang salah, misalnya seseorang membeli sebuah motor, ia menyangka motor tersebut mesinnya masih normal, tetapi sebenarnya motor tersebut telah turun mesin.²⁶

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq* dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.²⁷

- a. Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi dua bagian:
 - 1) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah dan ijarah.
 - 2) Akad *ghair musammah*, yaitu akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- b. Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
 - 1) Akad *musyara'ah*, yaitu aka-akad yang dibenarkan oleh *syara'* seperti gadai dan jual beli.
 - 2) Akad *mamnu'ah*, yaitu akad-akad yang dilarang *syara'* seperti menjual anak binatang dalam induknya.

²⁶*Ibid.*, h. 52.

²⁷*Ibid.*

- c. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi 2:
 - 1) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - 2) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.
- d. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akan terbagi 2:
 - 1) Akad *'ainiyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - 2) Akad *ghair 'ainiyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad *amānah*.
- e. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi 2 bagian:
 - 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh 2 saksi, wali dan petugas pencatat nikah.
 - 2) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- f. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi 2 bagian:
 - 1) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - 2) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- g. *Luzum* dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi 4:
 - 1) Akad *lāzim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain,

seperti bersetubuh, tetapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan *syara'* seperti talak dan *khulu'*.

- 2) Akad *lāzim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
 - 3) Akad *lāzim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai suatu benda punya kebebasan apa saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
 - 4) Akad *lāzimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang ditiptkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.
- h. Tukar menukar hak, dari segi ini akad dibagi menjadi 3 bagian:
- 1) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual beli.
 - 2) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan seperti 'hibbah.
 - 3) Akad yang *tabaru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadhah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.
- i. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi 3 bagian:
- 1) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
 - 2) Akad *amānah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amānah*, seperti *rahn* (gadai).

- j. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi 5 golongan:
 - 1) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
 - 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudhārabah*.
 - 3) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiyah.
 - 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.
- k. *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi 2 bagian:
 - 1) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.
 - 2) Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akad terus berjalan, seperti *i'arah*.
- l. *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi 2 bagian:
 - 1) Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *i'arah*.
 - 2) Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada hutang.

6. *Ilzam* dan *Iltizām*

Ilzam ialah pengaruh yang umum bagi setiap akad. Ada juga yang menyatakan bahwa *ilzam* ialah ketidak mungkinan bagi yang melakukan akad untuk mencabut akadnya secara sepihak tanpa persetujuan pihak yang lain. *Iltizām* ialah keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ada juga yang menyatakan bahawa *iltizām* ialah:

كَوْنُ شَخْصٍ مُّكَلَّفٍ شَرٌّ عَابِعَمَلٍ أَوْامْتِنَاعٍ مِنْ عَمَلٍ لِمَصْلَحَةٍ غَيْرِهِ

“Seseorang yang dibebani pekerjaan menurut syara’ untuk mengerjakan sesuatu meninggalkan sesuatu untuk kemaslahatan orang lain.”²⁸

7. Berakhir Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
 - 1) Akad itu *fāsid*.
 - 2) Berlaku khiyar syarat, khiyar ‘aib.
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

Walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai (*rahn*) dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan.²⁹

C. *Wadī’ah*(Barang Titipan) Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Wadī’ah*

Wadī’ah adalah penitipan, yaitu dengan menitipkan suatu benda yang diletakkan kepada orang lain untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). *Wadī’ah* adalah suatu amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Semua bentuk ini diperbolehkan. Dan di dalam rukun *Wadī’ah* terdapat akad, akad merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan keduanya melaksanakan apa yang telah disepakati. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa

²⁸*Ibid.*, h. 56.

²⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...*, h. 112.

akad merupakan kegiatan dari dua belah pihak untuk maksud tertentu. Wahbah al-Zuhayly menjelaskan bahwa akad adalah mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak maupun dua pihak.

Kegiatan *Wadī'ah* sudah sangat dikenal secara umum dan praktiknya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, adanya *wadī'ah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak, maka kebutuhan masing-masing pihak bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan, salah satunya dengan menabung. Tabungan merupakan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu.

Ulama telah sepakat bahwa penerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin barang yang dititipkan, kecuali jika ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Tetapi jika ada kerusakan pada benda titipan yang disebabkan oleh kelalaian penerima barang titipan, maka ia wajib menggantinya.

Menurut Ahmad Wardi Muslich dalam buku Fiqh Muamalat menyatakan bahwa prinsip muamalah pada dasarnya semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam *syara'*. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muāmalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Adapun ayat al-Qur'an yang terdapat dalam Surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa (4) : 58)

Dan ada pun surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 283)

Adapun hadis tentang tabungan terdapat dalam HR. Bukhari sebagai berikut:

احتفظ ببعض ممتلكاتك لمستقبلك ، لأن ذلك أفضل لك

"Simpanlah sebahagian daripada harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu." (HR. Bukhari)

Dari uraian di atas menerangkan bahwa apabila kamu dititipi orang lain suatu barang, maka kamu harus memelihara, menjaga dan merawatnya dengan sebaik-baiknya seperti kamu menjaga barang milik kamu sendiri. Bahwa menabung adalah salah satu ikhtiar dalam kehidupan agar terhindar dari segala kesulitan finansial di masa depan. Dengan menabung manusia akan memiliki simpanan dana yang bisa digunakan kapan saja ketika membutuhkannya.

Menabung merupakan sesuatu yang sangat baik, karena dengan menabung berarti memikirkan masa depan. Karna tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, oleh karena itu sudah sepatutnya mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan menabung adalah salah satu cara untuk mempersiapkan

masa depan. Dengan menabung, membiasakan diri untuk tidak terlalu boros dalam mengolah keuangan, dengan ini bukan berarti harus pelit atau terlalu irit, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra' ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ٢٩

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (QS. Al-Isra' (17) : 29)

Juga dalam surat Al Furqan ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (QS. Al-Furqan (25) : 67)

Allah SWT menganjurkan kepada kita agar tidak berlebihan dalam membelanjakan harta (boros) dan kita tidak boleh pula kikir dalam menggunakan harta yang kita miliki. Menabungkan sebagian harta yang kita miliki bisa menjadi alternatif dalam menghindari sikap boros.

Barang titipan dikenal dalam bahasa *fiqh* dengan *al-wadī'ah*, menurut bahasa *al-wadī'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti bahwa *al-wadī'ah* ialah memberikan. Makna lain *al-wadī'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awda'uhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadī'ah* “*Indi*”). Jadi secara bahasa *al-wadī'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk

dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabūlihi*).³⁰

Menurut istilah *al-wadī'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Malikiyah *al-wadiah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

“Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.”³¹

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَضَعُ نَفْلُهُ إِلَى الْمُودَعِ

“Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.”

- b. Menurut Hanafiyah bahwa *al-Wadī'ah* ialah berarti *al-Ida'*, yaitu:

عِبَارَةٌ عَنْ أَنَّ يَسْتَلِطَ شَخْصٌ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيحًا أَوْ دِلَالَةً

“Ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.”

Makna yang kedua *al-wadī'ah* ialah sesuatu yang dititipkan (*al-Syai' I al-Maudi'*), yaitu:

مَا تَتْرَكَ عِنْدَ الْأَمِينِ لِيَحْفَظَهَا

“Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaganya.”

- c. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* ialah:

الْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمُودَعِ

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”³²

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 179.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, h. 180.

- d. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* ialah:

الْإِيْدَاعُ تَوْكِيلٌ فِإِلْحَفِظِ تَبْرُعًا

“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabaru).”

- e. Menurut Hasbi Ash-Shidique *al-wadī'ah* ialah:

عَقْدُ مَوْضُوعَهُ اسْتِعَانَةَ الْإِنْسَانِ بِغَيْرِهِ فِي حِفْظِ مَالِهِ

“Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.”

- f. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh ‘Umairah *al-wadī'ah* ialah:

الْعَيْزُ الَّتِي تُوَضَّعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا

“Benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya.”

- g. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud *al-wadī'ah* ialah:

الْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِلِاسْتِحْقَاقِ

“Akad yang dilakukan untuk penjagaan.”

- h. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.³³

Setelah diketahui definisi-definisi *al-wadī'ah* yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadī'ah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan).³⁴

³³*Ibid.*, h. 181.

³⁴*Ibid.*, h. 182.

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

Al-wadī'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah Swt:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ ۚ ٢٨٣

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.” (QS. Al-Baqarah (2) : 283)

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi Saw. bersabda:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.” (Riwayat Daruquthni).³⁵

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِّنٍ (رواه البيهقي)

“Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.” (Riwayat al-Baihaqi).³⁶

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

Rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' “*arkan*”, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnyanya (apabila ditinggalkan sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk pekerjaan itu).³⁷

Rukun akad *wadī'ah* menurut jumhur ulama, yaitu dua orang yang melakukan akad, sesuatu yang dititipkan, dan shigat

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh, Cet. Ke-3* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300.

(*ijāb* dan *qabūl*). *Qabūl* dari orang yang dititipi bisa, berupa perkataan, “Saya menerimanya”. Bisa juga tindakan yang menunjukkan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang lain itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi *qabūl*.³⁸

Menurut Syafi’iyah *al-wadī’ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Barang yang dititipkan (Obyek *wadī’ah*), syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut *Syara’*.
- b. Orang yang menitipkan (*Muwaddi’*) dan orang yang menerima titipan (*Mustauda’*), disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan adalah sudah *bāligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat *ijāb* dan *qabūl al-wadī’ah*, disyaratkan pada *ijāb* kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.³⁹

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadī’ah* ada satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl*, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Dalam shigat *ijāb* dianggap sah apabila *ijāb* tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk *qabūl*, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiyy*).⁴⁰

Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *Muwaddi’*, *Mustauda’* dan Obyek *Wadī’ah*. *Muwaddi’* dan *Mustauda’* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus *bāligh*, berakal dan dewasa. Sementara Obyek *Wadī’ah* disyaratkan harus

³⁸Hasbiyallah, *Sudah Syar’ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluruh Beluk Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2* (Yogyakarta: Salma Idea, 2020), h. 58.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 183.

⁴⁰*Ibid.*

berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/tangannya secara nyata.⁴¹

4. Macam-Macam *Wadī'ah*

Wadī'ah ada dua macam, yaitu *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad dhāmanah*.

a. *Wadī'ah yad Amānah*

Wadī'ah yad amānah adalah suatu akad penitipan pihak penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.⁴²

Dengan kata lain, *wadī'ah yad amānah* adalah suatu akad penitipan barang dan pihak penerima tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut serta apabila terjadi kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan karena kelalaian dari pihak penerima, maka pihak penerima tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.⁴³

Tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Barang yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya.

Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah *yad al-amānah* 'tangan amanah'.⁴⁴ Dengan ini, pihak yang menyimpan barang titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, melainkan hanya menjaga barang titipan tersebut. Selain itu, barang yang

⁴¹Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 123.

⁴²Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 57.

⁴³Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 43.

⁴⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), h. 41.

dititipkan tersebut tidak boleh dicampur adukkan dengan barang lain, melainkan harus dipisahkan dengan barang lain. Karena menggunakan prinsip *yad amānah*, maka akad titipan seperti ini disebut *wadī'ah yad amānah*.⁴⁵

b. *Wadī'ah Yad Dhamānah*

Wadī'ah yad dhamānah yaitu suatu akad penitipan barang pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Dengan demikian, *wadī'ah yad dhamānah* ialah suatu akad penitipan barang apabila pihak penerima titipan meskipun tanpa izin dari pemilik barang titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dan apabila barang tersebut rusak atau hilang setelah dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak penerima barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan tersebut harus mengganti serta membayar biaya ganti rugi dari barang yang dimanfaatkan tersebut.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, pihak yang menitipkan barang tidak perlu mengeluarkan biaya. Bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa orang yang menerima titipan memperoleh manfaat atas penggunaan barang titipan tersebut.

Dengan demikian, bahwa pihak penyimpan yang sekaligus sebagai penjamin keamanan barang yang dititipkan, telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh.

Dalam hal ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset pihak yang menyimpan barang titipan

⁴⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah ...*, h. 43.

⁴⁶Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 36.

tersebut dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak yang menerima barang titipan tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut dan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang titipan tersebut.⁴⁷ Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamānah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *Wadī'ah yad Dhamānah*.

Rukun dari akad titipan *Wadī'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*muwaddi'*) dan penyimpan atau penerima titipan (*mustawda'*);
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
- 3) *Shighah*, yaitu *Ijāb* dan *Qabūl*.⁴⁸

Wadī'ah yad amānah memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai ganti rugi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.⁴⁹

Sedangkan *wadī'ah yad dhamānah* memiliki karakteristik, antara lain:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah ...*, h. 44.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 43.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 283.

- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut.⁵⁰
- 3) Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana assetnya diinvestasikan.⁵¹

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunnah, haram, wajib dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sunnah, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadī'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah, dalam Al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi

⁵⁰*Ibid.*, h. 284.

⁵¹*Ibid.*, h. 43.

orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.⁵²

6. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. sendiri masih ada.⁵³

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.⁵⁴

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, h. 183.

⁵³*Ibid.*, h. 184.

⁵⁴*Ibid.*

dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.⁵⁵

Para ulama sepakat bahwa *wadī'ah* adalah ibadah yang dianjurkan dan penjagaan terhadapnya mendapatkan pahala. Ia juga merupakan amanah murni, tidak ada jaminan ganti untuknya dari orang yang dititipi. Jaminan ganti untuk barang titipan tidak menjadi wajib atas orang yang dititipi kecuali karena pelanggaran atau ketidakseriusannya dalam menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang artinya *“Tidak ada kewajiban memberikan ganti bagi orang yang mendapat titipan yang tidak berkhianat.”*

Namun demikian, ada beberapa kondisi yang membuat titipan harus dijamin gantinya, yaitu:

- a. Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan.
- b. Orang yang dititipi menitipkan lagi kepada orang lain.
- c. Barang titipan tersebut digunakan atau dipakai.
- d. Bepergian dengan membawa barang titipan.
- e. Pengingkaran terhadap adanya titipan.
- f. Pencampuran barang titipan dengan barang yang lain.
- g. Terjadinya pelanggaran dari orang yang dititipi terhadap syarat yang ditetapkan oleh pemilik barang.⁵⁶

7. Berakhirnya Akad *Wadī'ah*

Akad *wadī'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini:

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.
- b. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi.
- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad.
- d. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain.⁵⁷

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2..., h. 59.

⁵⁷*Ibid.*, h. 60.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Sukardja, Mujar Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, dan Kanun*, Jakarta: Sinar Grafik, 2012.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.
- , *Akad dan Produk Bank syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- , *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi, 2015.
- Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?: Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2*, Yogyakarta: Salma Idea, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: Mashun, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Cet. Ke-3, Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA, cv., 2016.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016.

Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Jurnal

Abdul Qodir Zaelani, Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh, *Jurnal ASAS*, Vol. IV No.2, Juli 2012.

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wawancara

Anastasya, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 29 Juni 2020.

Dina, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 7 Maret 2020.

Elsa, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 3 Juli 2020.

Erna, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 7 Maret 2020.

Intan, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 15 Februari 2020.

Nabila, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 15 Februari 2020.

Nani, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 29 Januari 2020.

Rahmasari, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 16 Januari 2020.

Ratna, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 7 Maret 2020.

Siwi, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 7 Maret 2020.

Yani, wawancara dengan penulis, di Perum Nusantara Permai, Bandar Lampung, 29 Juni 2020.

Sumber *on-line*.

Ahmad Darajat. “الكتاب كالخطاب”. (On-line), tersedia di: https://www.academia.edu/35095413/الكتاب_كالخطاب.

Ali Shodiqin. “Isyarat Orang Bisu Sama dengan Ucapannya”. (On-line), tersedia di: <https://www.hujjah.net/isyarat-orang-bisu-sama-dengan-ucapannya/>.

